

KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DALAM PRAKTIK PENGUNGKAPAN WAJIB PADA LAPORAN KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Arfan Amrin*)

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

Email : amrin.arfan021090@gmail.com

Abstract : *The purpose of this research is to know the influence corporate characteristics to mandatory disclosure in annual report. The independent variables in this research are liquidity (FDR), profitability (OER), and company size (SIZE). Sampling method that used is purposive sampling and there are 31 banks that will be research objects that listed in Bank Indonesia in 2011 accord an cewithestablished criteria. Statistical analysis is the multiple linea rregression analysis used to test the data includethe t test and F test. t test used to test the partial influence of independent variables to dependent variable and F test used to test the influence of independent variables to dependent variable simultaneously. The result of this research shows that partially, independent variable liquidity (FDR) and profitability (OER) not significantly influence to Mandatory Disclosure whereas company size (SIZE) significantly influence to Mandatory Disclosure. F test results shows that the independent variables liquidity (FDR), profitability (OER), and company size (SIZE) significantly influence to mandatory disclosure. This result indicated in the significant value of F value (8.793) > F (3.34) and the significance of this research is smaller than 0.05 (0.000 < 0,05). The coefficient of determination indicated from Adjusted R² that showed the number of 0,438 or 43.8% which means that the independent variables are liquidity (FDR), profitability (OER), and company size (SIZE) just able contribute by 43.8% to mandatory disclosure and the rest of 56.2 influence do explained by the other factors that are not included or are not investigated in this research.*

Keyword: *Mandatory Disclosure, Liquidity, Profitability, Company Size*

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat likuiditas (*FDR*), tingkat rentabilitas (*OER*), dan ukuran perusahaan (*SIZE*). Metode pengambilan sampel adalah dengan *purposive sampling* dan diperoleh 31 bank menjadi objek penelitian yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2011 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Analisis statistik yaitu analisis regresi linier berganda dilakukan untuk pengujian data meliputi uji *t* dan uji *F*. uji *t* digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan uji *F* digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat likuiditas (*FDR*) dan tingkat rentabilitas (*OER*) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib sedangkan variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib. Hasil uji *F* menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen tingkat likuiditas (*FDR*), tingkat rentabilitas (*OER*), dan ukuran perusahaan (*SIZE*) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansi sebesar $F_{hitung} (8,793) > F_{tabel} (3,34)$ dan signifikansi penelitian lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Nilai koefisien determinasi yang dilihat dari *Adjusted R²* menunjukkan angka sebesar 0,438 atau 43,8% yang berarti bahwa variabel independen yaitu tingkat likuiditas (*FDR*), tingkat rentabilitas (*OER*), dan ukuran perusahaan (*SIZE*) hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 43,8% terhadap tingkat pengungkapan wajib dan sisanya sebesar 56,2 dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dicantumkan atau tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Pengungkapan Wajib, Tingkat Likuiditas, Tingkat Rentabilitas, Ukuran Perusahaan*

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya perbankan syariah mulai berkembang pesat sejak tahun 1999 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyempumaan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, memicu perkembangan perbankan lembaga bisnis syariah lainnya. Dengan adanya perkembangan atau kondisi lingkungan ekonomi yang senantiasa mengalami perubahan sangat berpengaruh terhadap *going concern* perusahaan.

Dalam upaya tetap tumbuh dan berkembang, perusahaan dihadapkan pada transparansi untuk mengungkapkan informasi perusahaannya agar dapat membantu para pengambil keputusan termasuk keputusan oleh investor dalam mengantisipasi adanya perubahan kondisi. Pengungkapan informasi perusahaan terangkum dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan harus relevan, tepat waktu, dan bernilai.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang juga merupakan sumber informasi bagi investor sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan (*decision making*) serta sebagai sarana akuntabilitas manajemen atas sumber daya yang dikelolanya. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Wirosa, 2011:37).

Pengungkapan laporan keuangan (*disclosure of financial statement*) merupakan sarana pertanggungjawaban publik di berbagai bidang. Tingginya kualitas akuntansi sangat erat hubungannya dengan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi oleh karakteristik suatu perusahaan.

Yaya, dkk., (2009:81) menyatakan bahwa transaksi syariah berdasar atas prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*) dan *universalisme* (*syumuliyah*). Belkaoui (2011:287) menyatakan terdapat kesepakatan umum dalam akuntansi bahwa sebaiknya terdapat pengungkapan yang penuh, adil, dan memadai atas data akuntansi. Selanjutnya, prinsip pengungkapan penuh menunjukkan bahwa tidak ada informasi atas substansi atau kepentingan bagi kebanyakan investor yang akan dihilangkan atau disembunyikan (Belkaoui, 2011:287).

Ainun Na'im dan Fu'ad (2000) dalam Yuliansah dan Yeni Megawati (2007) menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan melebihi pengungkapan wajib yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku.

Pengungkapan informasi secara jujur dan terbuka dalam semua hal dapat mempengaruhi kepercayaan *stakeholder* terhadap kinerja manajemen. Ketergantungan kejujuran dalam penyajian akuntansi konvensional yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum telah menimbulkan beberapa keterbatasan dan ketidakadilan dalam pelaporan dan pengungkapan (Belkaoui, 2000:215). Selanjutnya, menimbulkan terjadinya kesenjangan harapan antara *stakeholder* dan manajemen atas informasi keuangandan non-keuangan yang diungkapkan dalam laporan keuangan.

Pengungkapan informasi kinerja yang komprehensif termasuk informasi yang memungkinkan nasabah menilai keuntungan dan risiko menabung di

bank syariah sangat penting mengingat pembagian keuntungan nasabah bank syariah bukan atas dasar bunga, melainkan atas pembagian hasil investasi (*revenue sharing*). Pengungkapan informasi kepada *stakeholder* bank syariah seharusnya tidak terbatas pada informasi keuangan saja, tetapi juga informasi non-keuangan yang memungkinkan nasabah mengetahui tingkat kesesuaian operasional bank dengan prinsip syariah.

Topik tentang pengungkapan laporan keuangan menjadi menarik karena praktik pengungkapan laporan keuangan berhubungan dengan kredibilitas dan kepercayaan pihak eksternal serta peranannya mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan yang mengarah pada transparansi menjadikan topik pengungkapan laporan keuangan perusahaan publik semakin relevan untuk dikaji.

Yuliansyah dan Yenny Megawati (2007) meneliti tingkat pengungkapan pada sektor industri barang konsumsi yang *go public* di BEJ. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat keluasan pengungkapan laporan dengan rata-rata tingkat pengungkapan adalah 0,6644 (66,44%) yang berarti masih relatif rendah.

Penelitian lain dilakukan oleh Luciana Spica Almilia dan Ikka Retrinasari (2007) pada laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ dengan meliputi rasio likuiditas, rasio *leverage*, *net profit margin*, ukuran perusahaan, dan status perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks kecukupan pengungkapan wajib adalah minimum 15,23% dan maksimum adalah 45,25% dengan rata-rata 28,09%. Indeks pengungkapan sukarela berkisar antara 3,8% sampai 34,62%, dengan rata-rata 18,5% dan indeks kelengkapan pengungkapan (wajib dan sukarela)

minimum adalah 29,55% dan maksimum adalah 66,56%, dengan rata-rata 46,59%.

Dengan variasi hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini bermaksud menguji secara generalisasi hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan bentuk replikasi dari penelitian Yuliansyah dan Yenny Megawati (2007) serta Luciana Spica Almilia dan Ikka Retrinasari (2007) dengan memperhatikan beberapa variabel yang terkait serta objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini ingin menguji apakah pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Karakteristik Perusahaan sebagai variabel Independen, yang terdiri dari atas tingkat likuiditas, tingkat rentabilitas dan ukuran (*size*) perusahaan dan tingkat pengungkapan wajib sebagai variabel dependen.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bank Syariah

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yakni prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Yaya, dkk., 2009:54). Bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan menganut prinsip-prinsip yang meliputi: 1) prinsip keadilan; 2) prinsip kesedarajatan; dan prinsip ketentraman (Luth, 2005:78-80).

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Bab II Pasal 4 menyatakan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi di antaranya adalah: 1) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; 2) menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmal*; 3) menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*); dan 4) melaksanakan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan Teori

Agency Theory

Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Wardhani, 2008). Implikasi atas pendelegasian ini tentu saja agen harus mampu mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada prinsipal.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu melakukan atau bertindak sesuai dengan kepentingan. Konflik kepentingan ini merupakan masalah lembaga yang resolusi menimbulkan biaya-biaya perusahaan untuk memantau, mengamati dan memastikan bahwa perilaku manajer yang cocok sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan kata lain antara kedua pihak tidak selalu harmonis dikarenakan adanya konflik kepentingan yang sering timbul.

Dalam konteks *agency theory*, laporan keuangan disajikan oleh manajer/agen sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan pemilik/prinsipal yang diamanahkan kepadanya. Jadi, dapat dinyatakan bahwa agen merupakan penyaji laporan keuangan dan prinsipal merupakan pemakai laporan keuangan.

Laporan Keuangan dan *Disclosure* (Pengungkapan)

Laporan keuangan merupakan *signal* untuk mengkomunikasikan informasi penting yang dimiliki manajemen perusahaan serta dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu (Harahap, 2010:105).

Selain itu, PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dalam paragraf 8, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah (IAI, 2009:101.2) yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2009:101.2)

Laporan keuangan beserta pengungkapannya dibuat perusahaan dengan tujuan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan-keputusan investasi dan pendanaan, seperti yang dinyatakan dalam SFAC No. 1 bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi yang meliputi: 1) keputusan investasi dan kredit; 2) jumlah dan *timing* arus kas; 3) aktiva dan kewajiban; 4) kinerja perusahaan; 5) sumber dan penggunaan kas; 6) penjelasan dan interpretif; dan 7) *stewardship*.

Prinsip Akuntansi Indonesia (1984) dalam Harahap (2008:120-121) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah: 1) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan

kewajiban serta modal suatu perusahaan; 2) Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba; 3) Memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba; 4) Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan; dan 5) Mengungkapkan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti kebijakan akuntansi.

Pengungkapan dalam laporan keuangan terdiri dari data kuantitatif dan kriteria data yang material serta relevan bagi investor dan kreditor sehingga perlu ditekankan informasi keuangan serta data lain dalam laporan keuangan sebagai suatu informasi dalam *decision making*. Akan tetapi, semua data kuantitatif tidak selamanya dinilai atau dilaporkan memiliki profitabilitas oleh investor. Sehingga perlu juga untuk menyajikan data kualitatif seperti segmen perusahaan, geografis atau *merger* dalam pertumbuhan dan perkembangan perusahaan secara *detail* (rinci). Dengan demikian, laporan keuangan juga harus memenuhi tujuan kualitatif yaitu: relevan, dapat dipahami, andal, dan dapat dibandingkan (Yaya, dkk., 2009:85-86).

Pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan merupakan cara dari pihak perusahaan (sebagai *sender*) untuk memberikan informasi atas hasil operasinya selama satu periode tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan (sebagai *receiver*) untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai suatu bahasa bisnis, informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan harus dapat berguna dan tidak membingungkan para pemakainya. Informasi yang diungkapkan harus bermanfaat dan tidak membingungkan pemakai laporan atau pengguna laporan

keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, banyak informasi yang diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, pemakai, atau pengguna laporan keuangan, melainkan juga pada kebutuhan standar. Oleh karena itu, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang sedang berlangsung serta berguna dan tidak membingungkan pengguna atau pemakai laporan keuangan.

Informasi keuangan yang diungkapkan digolongkan ke dalam dua jenis pengungkapan terkait dengan persyaratan yang ditetapkan standar atau peraturan (Ainun Na'im dan Fu'ad Rakhman, 2000 dalam Yuliansyah dan Yeni Megawati, 2007). Pertama adalah Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*) yang pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan IAI. Pengungkapan wajib berarti bahwa jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, maka pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan tersebut untuk mengungkapkannya. Kedua adalah Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*) yang sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan butir-butir atau informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut tanpa diharuskan atau diwajibkan oleh perusahaan yang berlaku. Perusahaan berhak untuk memberikan informasi tambahan yang bersifat sukarela selama tidak bertentangan dengan item-item dalam *mandatory disclosure* untuk mempermudah para pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan dan tergantung pada kebijakan perusahaan.

Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai. Ada tiga konsep yang umumnya diungkapkan (Harahap 2008:268) yaitu *full disclosure*,

adequate disclosure dan fair disclosure. *Full disclosure disclosure* (pengungkapan penuh) diartikan sebagai penyediaan semua informasi yang dianggap cukup penting dalam mempengaruhi penilaian dan keputusan yang akan diambil pengguna/pemakai laporan keuangan. *Adequate disclosure* (pengungkapan cukup) mengandung arti *disclosure* minimal yang harus ada sehingga laporan tidak menyesatkan. *Fair disclosure* (pengungkapan wajar) menyatakan tujuan-tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama bagi semua pembaca potensial.

Ketentuan umum pengungkapan adalah bahwa laporan bank syariah harus mengungkapkan informasi umum mengenai bank syariah dan informasi tambahan (Harahap, 2008:519-520) misalnya: 1) Karakteristik kegiatan bank dan jasa yang diberikan; 2) Tugas dan kewenangan DPS; 3) Tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat; 4) Kebijakan akuntansi, pengakuan pendapatan, penyisihan kerugian aktiva produktif, dan konsolidasi laporan keuangan; 5) Transaksi yang dilarang syariah dan menyelesaikannya; 6) Dana yang tidak terikat; dan 7) Aktiva produktif (jenis, sektor, jumlah, klasifikasi, penyisihan kerugian, dan aktiva produktif bermasalah). Hidayah (2008:57) menyatakan tujuan umum dari pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda dan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi, informatif, atau melayani kebutuhan khusus.

Tingkat Pengungkapan

KDPPLK syariah dalam paragraf 59, agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya (IAI, 2009:20). Adanya kesenjangan untuk tidak melakukan pengungkapan menjadikan informasi tersebut menyesatkan

sehingga tidak dapat diandalkan dan akibatnya tidak relevansi. Meskipun kualitas akuntansi masih memiliki atau mempunyai makna ganda, banyak penelitian yang menggunakan metode indeks pengungkapan untuk mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan keuangan.

Tinggi rendahnya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian dapat diketahui dan dipahami bahwa pengungkapan *financial report* merupakan suatu bentuk kualitas untuk menilai manfaat dari *financial report* tersebut. Tingkat pengungkapan laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan metode indeks pengungkapan seperti indeks Wallace yang dapat dikembangkan sendiri oleh peneliti atau dikembangkan lembaga tertentu. Pengukuran dilakukan dengan memberikan nilai terhadap item yang disebutkan oleh perusahaan (perbankan syariah).

Karakteristik Perusahaan

Transparansi dan akuntabilitas suatu perusahaan dapat dilakukan dengan pengungkapan (*disclosure*) yang merupakan salah satu bagian penting dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, pengungkapan merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Standar penyajian dan pengungkapan informasi akuntansi keuangan perbankan syariah dijabarkan dalam *Financial Accounting Standard* No. 1 yang membahas tentang materialitas informasi penyajian dan kecukupan pengungkapan (Harahap, 2008:527). Standar ini menjelaskan bagaimana pengungkapan berbagai informasi baik mengenai kebijakan akuntansi maupun pedoman pengungkapan masing-masing pos yang ada dalam laporan keuangan perbankan syariah.

Pengungkapan laporan keuangan (*disclosure of financial statement*)

merupakan sarana pertanggungjawaban publik di berbagai bidang. Tingginya kualitas informasi akuntansi sangat erat hubungannya dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan sedangkan tingkat pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi oleh karakteristik suatu perusahaan.

Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri yang melekat pada perusahaan, menandai sebuah perusahaan dan membedakannya dengan entitas lainnya. Karakteristik perusahaan dapat berupa likuiditas, rentabilitas, *size*, *leverage*, status perusahaan, dan lain-lain.

Pengembangan Hipotesis

Tingkat Likuiditas

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur seberapa likuid suatu bank dalam melayani nasabahnya (Kasmir, 2008:217). Likuiditas yang tinggi akan berhubungan dengan tingkat pengungkapan yang tinggi, dengan argumen bahwa kuatnya finansial suatu perusahaan cenderung memberikan pengungkapan dalam memberikan informasi luas. Dengan penjelasan tersebut, hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H₁: Tingkat Likuiditas (X_1) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan perbankan syariah.

Tingkat Rentabilitas

Rentabilitas atau sering juga disebut sebagai profitabilitas digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja perusahaan dalam memperoleh atau menghasilkan laba. Rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada (Harahap, 2010:304).

Rentabilitas yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, sebab mereka ingin menyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi manajemen.

Semakin tinggi profitabilitas atau rentabilitas suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapannya.

Hipotesis kedua adalah:

H₂: Tingkat Rentabilitas (X_2) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan perbankan syariah.

Ukuran (*Size*) Perusahaan

Banyak peneliti yang menemukan pengaruh *firm's size* terhadap tingkat *disclosure* (Singhvi dan Desai, 1971; Cooke, 1992; Craig dan Diga, 1998 dalam Djoko Suhardjanto, 2010). Salah satu argumen dalam penelitian Aida Noviani (2006), perusahaan besar lebih dimungkinkan mempunyai biaya produksi informasi atau biaya kerugian persaingan yang lebih rendah dari pada perusahaan yang lebih kecil. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula perhatian *stakeholder*. Sehingga perusahaan atau entitas akan semakin banyak melaporkan suatu informasi.

Hipotesis ketiga adalah:

H₃: Ukuran Perusahaan (X_3) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain studi hubungan sebab-akibat di antara variabel (dua variabel atau lebih). Penelitian ini menguji hipotesis tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tingkat pengungkapan wajib. Tingkat pengungkapan wajib sebagai variabel dependen dan karakteristik perusahaan sebagai variabel dependen yang diprosikan oleh tingkat likuiditas, tingkat rentabilitas, dan ukuran (*size*) perusahaan.

Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah di Bank Indonesia yang berjumlah 35 bank syariah (meliputi: 11 bank umum syariah dan 24 unit syariah). Data berasal dari situs

resmi Bank Indonesia dan Bank Syariah yang menjadi objek penelitian.

Teknik pengambilan sampling dilakukan dengan dengan *purposive sampling*, yaitu Teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria/pertimbangan tertentu (*judgement sampling*) berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Beberapa pertimbangan atau kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: 1) Kategori perbankan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan syariah tidak termasuk BPRS (hanya Bank umum syariah dan unit syariah); 2) Perbankan syariah tersebut telah terdaftar di Bank Indonesia; 3) Perbankan syariah mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan 2011 secara lengkap; 4) Laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasikan telah diaudit; dan 5) Perbankan syariah tidak *delisting* pada periode tersebut.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel Independen

Tingkat Likuiditas

Likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang menggambarkan jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. FDR diukur dengan membandingkan jumlah pembiayaan dengan dana pihak ketiga.

Tingkat Rentabilitas

Tingkat rentabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Operatinal Efficiency Ratio* (OER) yang bertujuan untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional perbankan syariah. OER diukur dengan membandingkan antara beban operasional dengan pendapatan operasional.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan memberikan skor pada item pengungkapan (1 untuk yang item diungkapkan dan 0 untuk yang item yang tidak diungkapkan). Standar pengungkapan yang harus diungkapkan diatur dalam PSAK Syariah. Instrumen pengukuran proporsi pengungkapan yang digunakan adalah item-item pengungkapan yang dikembangkan dari kriteria penilaian *Annual Report* berdasarkan PSAK sebanyak 65 item. Proporsi *disclosure* setiap bank diukur dengan indeks yaitu total skor yang diberikan kepada sebuah perusahaan dengan skor yang diharapkan (maksimal) dapat diperoleh perusahaan tersebut.

Ringkasan pengukuran variabel independen dan dependen dalam penelitian ini dapat dilihat pada Table 1.

Tabel 1: Pengukuran Variabel Independen dan Dependen

Variable	Proxy	Pengukuran
Dependent Variable		
1. IPW	Level pengungkapan Indeks Pengungkapan Wajib	Jumlah item instrumen penelitian yang diungkapkan dalam annual report dibagi 65
Independent Variable		
1. Likuiditas	FDR	Pembiayaan dibagi Dana Pihak Ketiga
2. Rentabilitas	OER	Beban Operasional dibagi Pendapatan Operasional
3. Size	Total Asset	LN total asset pada tahun finansial

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistic deskriptif dan

pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS *release* 20.

Statistik Deskriptif

Statistic deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data berupa frekuensi, rata-rata hitung, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Statistic deskriptif dalam penelitian ini hanya menganalisa data yang telah terkumpulkan.

Pengujian Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$IPW = a + b_1FDR + b_2OER + b_3SIZE + e$$

Dimana,

- IPW = Indeks Pengungkapan Wajib,
 a = Intercept/Konstanta
 b₁-b₃ = Koefisien Regresi Variabel Bebas
 FDR = Financing to Deposit Ratio
 OER = Operational Efficiency Ratio
 SIZE = Ukuran Perusahaan (LN Asset)
 e = Kesalahan Baku/Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 35 bank syariah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2: Bank Syariah Terdaftar di BI Tahun 2011

No	Tipe Perbankan	Jumlah
1	Bank Umum Syariah	11
2	Unit Usaha Syariah	9
3	Unit BPD Syariah	15
	Total	35

Setelah dilakukan pengambilan sampel atas populasi, berdasarkan criteria yang telah ditentukan, maka diperoleh 31 bank syariah sebagai sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Rincian sampel dapat dilihat sebagai berikut:

Setelah dilakukan pengambilan sampel atas populasi, berdasarkan criteria yang telah ditentukan, maka diperoleh 31 bank syariah sebagai sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Rincian sampel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3: Sampel

No	Tipe Perbankan	Jumlah	Persentase
1	Bank Umum Syariah	9	29
2	Unit Usaha Syariah	8	26
3	Unit BPD Syariah	14	45
	Total	31	100

Tabel 4 menunjukkan daftar sampel dalam penelitian ini yang terpilih dari 35 populasi.

Tabel 4: Daftar Sampel

No	Nama Emiten (Perbankan)	Sampel
1	PT. Bank BNI Syariah	Sampel 1
2	PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk	Sampel 2
3	PT. Bank Syariah Mandiri	Sampel 3
4	PT. Bank Syariah Mega Indonesia	Sampel 4
5	PT. Bank BCA Syariah	Sampel 5
6	PT. Bank BRI Syariah	Sampel 6
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah	Sampel 7
8	PT. Bank Panin Syariah	Sampel 8
9	PT. Bank Syariah Bukopin	Sampel 9
10	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Sampel 10
11	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk	Sampel 11
12	PT. Bank International Indonesia Tbk	Sampel 12
13	PT. Bank OCBC NISP Tbk	Sampel 13
14	PT. Bank Permata Tbk	Sampel 14
15	PT. Bank Sinarmas Tbk	Sampel 15
16	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Sampel 16
17	PT. Bank CIMB Niaga Tbk	Sampel 17
18	BPD Yogyakarta	Sampel 18
19	BPD Kalimantan Timur	Sampel 19
20	PT. Bank DKI	Sampel 20
21	PT. Bank Aceh	Sampel 21
22	PT. Bank Sulselbar	Sampel 22
23	PT. BPD Riau Kepri	Sampel 23
24	PT. BPD Sumatera Barat	Sampel 24
25	PT. BPD Jawa Tengah	Sampel 25
26	PT. BPD Jawa Timur	Sampel 26
27	PT. BPD Kalimantan Barat	Sampel 27
28	PT. BPD Nusa Tenggara Barat	Sampel 28
29	PT. BPD Kalimantan Selatan	Sampel 29
30	PT. BPD Sumsel dan Bangka Belitung	Sampel 30
31	PT. Bank Sumut	Sampel 31

Tabel berikut ini (Tabel 5) menunjukkan item pengungkapan wajib dengan tingkat pengungkapannya

Tabel 5: Data Ringkasan Pengungkapan Wajib

No. Sampel	PSAK						JMLH	Item Wajib	Indeks
	102	103	104	105	106	107			
1	11	0	0	14	10	5	40	65	0.62
2	11	0	13	14	10	5	53	65	0.82
3	11	0	9	13	9	5	47	65	0.72
4	11	0	0	13	9	0	33	65	0.51
5	11	0	0	11	7	5	34	65	0.52
6	11	0	12	13	9	5	50	65	0.77
7	10	0	8	13	9	5	45	65	0.69
8	10	0	0	13	8	0	31	65	0.48
9	11	0	5	12	7	5	40	65	0.62
10	7	0	5	9	6	4	31	65	0.48
11	3	0	1	7	4	0	15	65	0.23
12	6	0	5	9	6	5	31	65	0.48
13	0	0	1	8	5	4	18	65	0.28
14	5	0	1	7	6	5	24	65	0.37
15	7	0	0	11	6	5	29	65	0.45
16	7	0	0	8	0	0	15	65	0.23
17	3	0	0	7	4	2	16	65	0.25
18	3	0	4	7	4	4	22	65	0.34
19	4	0	4	8	4	4	24	65	0.37
20	5	0	0	9	5	4	23	65	0.35
21	4	0	4	8	6	4	26	65	0.40
22	7	0	0	12	0	4	23	65	0.35
23	7	2	5	11	8	5	38	65	0.58
24	4	0	4	8	5	4	25	65	0.38
25	6	0	6	7	6	5	30	65	0.46
26	6	0	6	8	5	5	30	65	0.46
27	5	0	0	9	6	0	20	65	0.31
28	7	0	0	2	0	5	14	65	0.22
29	8	0	0	10	6	4	28	65	0.43
30	3	0	0	6	4	4	17	65	0.26
31	4	0	4	8	5	4	25	65	0.38
Jumlah	208	2	97	295	179	116	897		
Mean	5,9	0	2,8	8,43	5,11	3,31	25,63		

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa item yang paling banyak diungkapkan adalah item PSAK No 105 tentang Akuntansi Mudharabah, selanjutnya PSAK No. 106 tentang Akuntansi Musyarakah, lalu disusul oleh PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah, kemudian PSAK No. 107

tentang ijarah dan di posisi terakhir ada PSAK No. 103 tentang Akuntansi Salam.

Tabel 6 berikut ini merupakan table deskriptif yang menunjukkan gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini. Hasil ini diperoleh dengan bantuan program SPSS Versi 20.

Tabel 6: Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	SD
Tingkat Pengungkapan Wajib	31	.22	.82	.4455	.16198
Tingkat Likuiditas (FDR)	31	48.40	263.37	111.8865	45.69858
Tingkat Rentabilitas (OER)	31	5.61	186.46	63.6694	39.28841
Ukuran Perusahaan (SIZE)	31	25.87	31.52	27.9426	1.45537
Valid N (listwise)	31				

Dari statistik deskriptif (Tabel 6) di atas, dapat dilihat bahwa *mean* tingkat pengungkapan wajib adalah sebesar 44,55%. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan perbankan untuk mengungkapkan informasi mengenai tingkat pengungkapan wajib masih rendah. Bank yang paling banyak mengungkapkan mengenai pengungkapan wajib adalah Bank Muamalat Indonesia Tbk yaitu sebanyak 53 item yang diungkapkan dari 65 item wajib yang berarti bahwa tingkat pengungkapannya sebesar 81,54%.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Akan tetapi sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian ini dilakukan agar hasil perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan secara tepat. Dengan kata lain pengujian dilakukan agar terhindar dari sifat bias serta lebih efisien. Kecocokan atau kesesuaian model regresi secara statistik dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi dan nilai F statistik.

Tabel 7: Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien	t	Sig.
(Constant)	-1,699	-3,382	,002
Tingkat Likuiditas (FDR)	,000	,382	,705
Tingkat Rentabilitas (OER)	,001	,1620	,117
Ukuran Perusahaan (SIZE)	,074	4,373	,000
R Square	,494		
Adjusted R Square	,438		
F	8,793		
Sig	,000		

Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat di Tabel 7. *Adjusted R Square* menunjukkan nilai sebesar 0,438 atau 43,8%. Nilai ini menunjukkan bahwa ada kontribusi atau pengaruh sebesar 43,8% dari variabel independen yang meliputi Tingkat Likuiditas (*FDR*), Tingkat Rentabilitas (*OER*), dan Ukuran Perusahaan (*SIZE*) dalam memprediksi tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan perbankan syariah yang menjadi target populasi. Sementara sisanya yaitu sebesar 56,2% (100% - 43,8%) dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti/tidak tercantum dalam penelitian ini. Kecocokan atau kesesuaian model regresi dapat kita lihat pada nilai F yang menunjukkan angka sebesar 8.793 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas ini berada di bawah atau lebih kecil dari 0,05 sehingga model regresi tersebut dapat digunakan secara

baik untuk memprediksikan tingkat pengungkapan wajib.

Tingkat likuiditas (*FDR*) pada tabel di atas adalah sebesar 0,382 dengan signifikansi sebesar 0,705. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,382 < 2,045$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,705 > 0,05$) menunjukkan H_1 dalam penelitian ini ditolak yang berarti bahwa secara parsial tingkat likuiditas (*FDR*) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib. Tingkat rentabilitas (*OER*) pada tabel di atas adalah sebesar 1,620 dengan signifikansi sebesar 0,117. Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,620 < 2,045$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,117 > 0,05$) menunjukkan H_2 dalam penelitian ini ditolak yang berarti bahwa secara parsial tingkat rentabilitas (*OER*) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib. Dan ukuran perusahaan (*SIZE*) pada tabel di atas adalah sebesar 4,373

dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,373 > 2,045$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) menunjukkan H_3 dalam penelitian ini diterima yang berarti bahwa secara parsial ukuran perusahaan (*SIZE*) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib.

Konsisten dengan penelitian yang dilakukan Aida Noviani (2006); Adelina Sihite (2010); Yuliansyah dan Yeni Megawati (2007); dan bertentangan atau tidak sejalan dengan penelitian Luciana Spica Almilia dan Ikka Retrinasari (2007) bahwa tingkat likuiditas (*FDR*) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib. Penelitian tentang tingkat rentabilitas dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Adelina Sihite (2010) bahwa tingkat rentabilitas (*OER*) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib. Sementara Ukuran perusahaan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Aida Noviani (2006); Yuliansyah dan Yeni Megawati (2007); Luciana Spica Almilia dan Ikka Retrinasari (2007); Adelina Sihite (2010); dan Djoko Suhardjanto (2010) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Tingkat pengungkapan wajib pada perbankan syariah ternyata masih rendah hanya sebanyak 44,55% dari total 65 item pengungkapan wajib. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan kemauan perusahaan terhadap pentingnya pengungkapan wajib yang merupakan salah satu informasi yang paling banyak dipertimbangkan oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, rendahnya pengungkapan disebabkan karena tidak semua transaksi syariah dilakukan oleh bank seperti transaksi akuntansi *salam* dan *istishna* serta item

tersebut tidak ada sehingga tidak bias diungkapkan.

Variabel yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib adalah ukuran (*size*) perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula perhatian stakeholder akan hal tersebut karena pengaruhnya terhadap internal perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan dituntut agar mengungkapkan dan melaporkan informasi termasuk informasi mengenai pengungkapan wajib.

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa terkait dengan topik penelitian ini, masih ada *assimetri* informasi/*information gap*. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangan bagaimana mengurangi *assimetri/gap* tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib. Oleh sebab itu, perusahaan besar harus terus dituntut untuk mengungkapkan informasi mengenai pengungkapan wajib sebagai kebutuhan bagi pihak yang berkepentingan.

Pengungkapan laporan keuangan perbankan ditentukan atas dasar interpretasi peneliti setelah membaca isi laporan keuangan (*financial statement*) dan *annual report* perbankan yang diteliti, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan penilaian antar perbankan karena kondisi subyektifitas peneliti. Selain itu, penilaian item laporan keuangan tanpa pembobotan dan penjelasan dari perbankan yang diteliti. Masing-masing item pengungkapan diperlakukan sama dan diasumsikan semua perbankan yang diteliti seharusnya mengungkapkan item tersebut.

REFERENSI

- Abdullah, Muhammad Faisal. 2003. *Manajemen Perbankan*. Malang: UMM Pres.
- Almilia, Luciana Spica dan Ikka Retrinasari. 2007. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan

- Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ. *Proceeding Seminar Nasional Inovasi dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis*. Jakarta: FE Universitas Trisakti.
- Atmaja, Lukas Setia. 2009. *Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: ANDI.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2000. *Teori Akuntansi*. Terjemahan, Marwata, Harjanti, Ch. Heni, dan Alia. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2011. *Teori Akuntansi*, Edisi 5, Buku 1. Terjemahan, Ali Akbar Yulianto dan Risnawati Dermauli. Jakarta: Salemba Empat.
- DSAK IAI. 2009. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPPKS)*. Jakarta: IAI.
- DSAK IAI. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: IAI.
- DSAK IAI. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 tentang Akuntansi Murabahah*. Jakarta: IAI.
- DSAK IAI. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 103 tentang Akuntansi Salam*. Jakarta: IAI.
- DSAK IAI. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 104 tentang Akuntansi Istishna*. Jakarta: IAI.
- DSAK IAI. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: IAI.
- DSAK IAI. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 tentang Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: IAI.
- DSAK IAI. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 tentang Akuntansi Ijarah*. Jakarta: IAI.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Teori Akuntansi*, Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2010. *Analisis Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2011. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayah, Erna. 2008. Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi Terhadap Hubungan antara Penerapan Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan di BEJ. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 12 (1): 53-54.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lindrianasari. 2007. Hubungan Antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11 (2): 159-172.
- Luth, Thohir. 2005. *Bank Syariah*, Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Noviani, Aida. 2006. Analisis Pengungkapan Informasi Laporan Tahunan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Skripsi. Yogyakarta: Program Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2010. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. 2007. Jakarta: Bank Indonesia.
- Rahayu, Sovi Ismawati. Pengaruh Tingkat Ketaatan Pengungkapan Wajib Dan Luas Pengungkapan Sukarela Terhadap Kualitas Laba: Studi Pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur. *Jurnal Penelitian*.
- Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Media Elex Komputindo.
- Sayidah, Nur. 2007. Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik: Studi Kasus Peringkat 10 Besar CGPI Tahun 2003,2004, 2005. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11(1):1-19.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 2. Terjemahan, Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2009. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 1. Terjemahan, Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhardjanto, Djoko dan Laras Miranti. 2009. Indonesian Environmental Reporting Index dan Karakteristik Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 13 (1): 1-17.
- Suhardjanto, Djoko dan Mari Wardhani. 2010. Praktik *Intellectual Capital Disclosure* Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 14 (1): 71-85.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Umum Direksi Bank Indonesia.
- Triuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wardhani, R., 2008. Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia dan Hubungannya dengan Karakteristik Dewan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance. *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Pontianak, Juli.
- Wiroso, 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Yadiati, Winwin. 2010. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Yahya, Rizal, Aji E. Martawireja dan Ahim Abdurahim. 2009 *Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliansyah dan Yenny Megawati. 2007. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12 (1):81-90.